



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Estimasi KN Tol Rp 18 Miliar**

**BENGKULU** – Penyidik khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu mengestimasi kerugian negara yang timbul dalam dugaan kasus korupsi ganti rugi tanam tumbuh lahan area Tol seksi Bengkulu-Taba Penanjung 2019-2020, sekitar Rp 18 miliar.

Ini disampaikan Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH saat diwawancarai **RB**, Kamis (19/1).

“Untuk pastinya belum bisa kami sampaikan, masih estimasi, sekitar Rp 18 miliar. Itu masih

dinamis, bisa bertambah, bisa juga berkurang,” ungkap Danang.

Walaupun penanganan kasus ini sempat disebut akan tertuntaskan di awal tahun. Namun penyidik saat ini masih mendalami lebih rinci unsur-unsur adanya kelebihan bayar atau *mark up* yang diterima pemilik lahan. Kelebihan bayar ini terjadi akibat adanya komponen yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen pembebasan lahan, dalam prosesnya ternyata ada termuat komponen.

Seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) kemudian biaya notaris. Sehingga dana

pemerintah dengan nilai pembebasan lahan mencapai Rp 190 miliar, yang seharusnya tidak mencairkan beberapa komponen itu ternyata bisa dicairkan.

“Sejauh ini penyidik masih terus mendalami, dan ada beberapa penghitungan kami dapatkan dari ketidakbenaran pembebasan tersebut,” terang Danang.

Adapun estimasi sebesar Rp 18 miliar yang disampaikan Danang, hal tersebut masih dalam hasil perhitungan tim penyidik. “Masih sebatas penghitung oleh penyidik, belum kita serahkan ke auditor,” imbuhnya.

Pada perhitungan nilai lahan tol tersebut, baik fisik dan non fisik, ada dua tim yang bertugas dibawah oleh pelaksana pembebasan lahan. Yakni tim A dan tim B. Hingga saat ini sudah sebanyak 40 saksi yang telah diperiksa tim penyidik dalam kasus ini dengan mendalami berbagai unsur melawan hukum dalam pengadaan lahan tol tersebut.

“Ada empat atau lima kades setempat sudah kita periksa,” kata Danang.

Status kasus ini naik ke penyidik Kejati Bengkulu pada 21 Juli lalu (**jam**)